

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM  
PEREDARAN PRODUK MAKANAN CACAT  
( Studi Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2013/PN.WNS)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I Pada  
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD IQBAL**

**C100140295**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM  
PEREDARAN PRODUK MAKANAN CACAT**

**( Studi Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2013/PN.WNS)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**Muhammad Iqbal**

**C100140295**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Dr.Kelik Wardiono,S.H.,M.H.)**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM  
PEREDARAN PRODUK MAKANAN CACAT

( Studi Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2013/PN.WNS)

Oleh:

Muhammad Iqbal

C100140295

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari: *Selasa, 30 APRIL 2019*

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr.Kelik Wardiono,S.H., M.H.

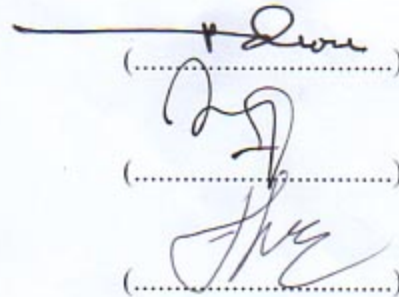
(Ketua DewanPenguji)

2. Inayah,S.H., M.H.

(Anggota I DewanPenguji)

3. Nuswardhani,S.H., M.S

(Anggota II DewanPenguji)

  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.Hum.)

NIK. 537/NIDN. 072708503

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Naskah Publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Mei 2019

Penulis



Muhammad Iqbal

## **TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM PEREDARAN PRODUK MAKANAN CACAT**

**( Studi Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2013/PN.WNS)**

### **Abstrak**

Pembangunan nasional pada satu pihak mendatangkan manfaat terhadap konsumen karena kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa yang di inginkan bisa terpenuhi sehingga semakin besar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas terhadap barang maupun jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Dampak negatif dari pembangunan nasional tersebut adalah kedudukan konsumen menjadi lemah, hal ini dikarenakan konsumen dijadikan sebagai aktivitas bisnis oleh pelaku usaha untuk mendatangkan keuntungan. Hal utama yang menjadi kelemahan konsumen yaitu mengenai kemampuan memahami haknya yang masih tergolong rendah. Hakim menilai peristiwa konkrit tentang berjualan makanan yang kadaluarsa dijadikan peristiwa hukum. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada Putusan Nomor: 74/ Pid.Sus/ 2013/PN.WNS melanggar Pasal 56 huruf d jo Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan yang menentukan bahwa "barang siapa karena kelalaiannya: huruf d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

**Kata Kunci:** Produk Makanan Kadaluarsa, Penegakkan Hukum, Penyelesaian Hukum Di Pengadilan

### **Abstract**

National development on the one hand brings benefits to consumers because consumer needs for the goods and services desired can be fulfilled so that the greater the freedom to choose various types and qualities of goods and services in accordance with the wishes and abilities of consumers. The negative impact of national development is the position of consumers to be weak, this is because consumers are used as business activities by businesses to bring profits. The main thing that becomes a consumer weakness is the ability to understand their rights which are still relatively low. The judge assessed that concrete events regarding the expiration of food were made legal events. That the deed committed by the defendant in Decision Number: 74 / Pid. Sus / 2013 / PN. WNS violates Article 56 letter d jo Article 21 letter e of Law Number 07 of 1996 concerning Food which determines that "whoever is due to negligence: letter d. circulating food which is prohibited from being circulated, as referred to in article 21

letter a, letter b, letter c, letter e, or letter punishable by imprisonment for a maximum of 1 year and / or a fine of Rp.120,000,000.00 (one hundred twenty million rupiah).

**Keywords:** Expired Food Products, Law Enforcement, Legal Settlement in Court

## 1. PENDAHULUAN

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh manusia. Manusia tidak bisa tanpa makanan, karena merupakan penghasil energi dalam melakukan aktivitas. Pasal 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dijelaskan bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Pembangunan nasional pada satu pihak mendatangkan manfaat terhadap konsumen karena kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa yang di inginkan bisa terpenuhi sehingga semakin besar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas terhadap barang maupun jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.<sup>1</sup> Dampak negatif dari pembangunan nasional tersebut adalah kedudukan konsumen menjadi lemah, hal ini dikarenakan konsumen dijadikan sebagai aktivitas bisnis oleh pelaku usaha untuk mendatangkan keuntungan. Hal utama yang menjadi kelemahan konsumen yaitu mengenai kemampuan memahami haknya yang masih tergolong rendah,<sup>2</sup>

Produk barang maupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin mengalami peningkatan, hal ini mengakibatkan

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, 2008, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 1-2.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 2.

kesenjangan terhadap kebenaran informasi serta daya tanggap masyarakat.<sup>3</sup> Kedudukan konsumen yang lemah dimanfaatkan oleh sebahagian pelaku usaha atau produsen tidak memberikan perhatian hak-hak konsumen.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pengertian Konsumen dijelaskan pada Pasal 1 amgka 2 yaitu “setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyaraat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali”.

Peraturan mengenai perlindungan konsumen juga memberikan asas manfaat sebagaimana dijelaskan pada Pasl 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Asas manfaat ini diberikan agar konsumen dan pelaku usaha yang terkait di dalamnya mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, berimbang.<sup>4</sup>

Kasus terhadap produk makanan yang melanggar hak konsumen dijelaskan pada Putusan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Toko Trijaya di Nglipar Lor Rt 05/03, Ds Nglipar, Kec Nglipar, Kabupaten Gunung kidul, saat Balai Besar POM Yogyakarta yaitu saksi Sri Yuniati dan saksi Rikhati, S FARM, APT melakukan penertiban terhadap peredaran obat dan makanan, dan juga melakukan pengecekan terhadap peredaran pangan kadaluarsa, menemukan 3 (tiga) macam pangan kadaluarsa yang dipajang di rak dalam ruang penjualan Toko Trijaya milik terdakwa. Selanjutnya barang tersebut yaitu Pangan Kadaluarsa berupa makanan dibawa ke kantor Balai

---

<sup>3</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 4.

<sup>4</sup> Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak (Anggota IKAPI, hal. 47.

Besar POM Yogyakarta dan disita sebagai barang bukti. Seharusnya terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab Toko Trijaya selalu meneliti atau cek dan recek terhadap barang yang dijual khususnya makananyang jelas mencantumkan waktu kadaluarsa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, sehingga di Toko milik terdakwa ditemukan Makanan Kadaluarsa.

Perbuatan dari pelaku usaha atau produsen tersebut melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; (c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; (d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; (e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; (f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; (g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; (h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; (i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; (j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan



perundang-undangan yang berlaku. (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Rumusan Masalah yang diteliti adalah; (a) Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan peredaran produk makanan cacat dalam Putusan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS? (b) Bagaimanakah keputusan hakim dalam memerikan perkara tentang peredaran produk makanan cacat dalam Putusan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS?

Untuk melangkah sesuai dengan maksud penelitian, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) Tujuan Obyektif; (a) Untuk mengetahui proses produksi dan pemasaran makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha. (b) Untuk penyelesaian hukum terhadap produk makanan yang dinilai cacat. (2) Tujuan Subyektif: Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis, khususnya Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Peredaran Produk Makanan Cacat. (a) Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penyusunan penelitian ini, agar dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **2. METODE**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang

dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum *in-concreto*.

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan peredaran produk makanan cacat dalam Putusan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2013/PN.WNS dan Bagaimanakah keputusan hakim dalam memerikan perkara tentang peredaran produk makanan cacat dalam Putusan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2013/PN.WNS.

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu : Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, dalam hal ini berupa: Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2013/PN.WNS, Surat Tugas No.PR.07.01.964.07.12.5566 Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM Yogyakarta. Data Primer, yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data skunder yang ada. Data primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data skunder.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Menentukan Peredaran Produk Makanan Cacat Dalam Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS**

Pertimbangan Hakim Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/ 2013/PN.WNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat

(23) menjelaskan Hakim hanya bersifat menunggu, artinya hakim hanya menunggu adanya perkara yang datang kepadanya, sehingga hakim Dalam Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/ 2013/PN.WNS tidak menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan, melainkan hakim memeriksa dan mengadili. Pada hakikatnya seorang hakim hanya mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa penjualan makanan yang kadaluarsa yang dilakukan oleh terdakwa.

Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan Hakim didalam pemeriksaan perkara Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/ 2013/PN.WNS perdata bersikap pasif. Hal ini berarti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim itu untuk diperiksa mengenai penjualan makanan kadaluarsa oleh para pihak yang berperkara dan bukan hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan, sehingga hakim hanya menggunakan pembuktian dalam mencari kebenaran tentang peristiwa hukum jual beli makanan kadaluarsa.

Secara konkrit dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan 2 (dua) tindakan secara bertahap, diantaranya yaitu: Melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan surat gugatan penggugat yaitu mengenai penjualan pangan yang sudah kadaluarsa yang kemudian peristiwa tersebut dibuktikan dan menghasilkan peristiwa konkrit yaitu terdakwa berjualan makanan yang kadaluarsa yang dapat menyebabkan konsumen mengidap penyakit jika mengkonsumsi panganan tersebut.

Menilai peristiwa konkrit tentang berjualan makanan yang kadaluarsa dijadikan peristiwa hukum. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada Putusan Nomor: 74/ Pid.Sus/ 2013/PN.WNS melanggar Pasal 56 huruf d jo Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan yang menentukan bahwa “barang siapa karena kelalaiannya: huruf d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk

diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan Pasal 21 huruf e menentukan bahwa “setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang sudah kadaluwarsa”.

Dalam Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS terdakwa Pasal 56 huruf d jo Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan yang menentukan bahwa “barang siapa karena kelalaiannya: huruf d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Menentukan Peredaran Produk Makanan Cacat Dalam Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (23) menjelaskan Hakim hanya bersifat menunggu, artinya hakim hanya menunggu adanya perkara yang datang kepadanya, sehingga hakim Dalam Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/ 2013/PN.WNS tidak menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan, melainkan hakim memeriksa dan mengadili.

Seorang hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu memberikan atau menentukan hukumnya. Secara konkrit dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan 3 (tiga) tindakan secara bertahap, diantaranya yaitu: (a) Mengkonstatir, Melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan surat gugatan penggugat yaitu mengenai penjualan pangan yang sudah kadaluarsa yang kemudian peristiwa tersebut dibuktikan dan menghasilkan peristiwa konkrit yaitu terdakwa berjualan makanan yang kadaluarsa yang dapat menyebabkan konsumen mengidap penyakit jika mengkonsumsi panganan tersebut; (b) Mengkualifisir, Menilai

peristiwa konkrit tentang berjualan makanan yang kadaluarsa dijadikan peristiwa hukum. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada Putusan Nomor: 74/ Pid.Sus/ 2013/PN.WNS melanggar Pasal 56 huruf d jo Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan yang menentukan bahwa “barang siapa karena kelalaiannya: huruf d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan Pasal 21 huruf e menentukan bahwa “setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang sudah kadaluarsa”.

Secara konkrit dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan 2 (dua) tindakan secara bertahap, diantaranya yaitu: Melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan surat gugatan penggugat yaitu mengenai penjualan pangan yang sudah kadaluarsa yang kemudian peristiwa tersebut dibuktikan dan menghasilkan peristiwa konkrit yaitu terdakwa berjualan makanan yang kadaluarsa yang dapat menyebabkan konsumen mengidap penyakit jika mengkonsumsi panganan tersebut.

Hakim menilai peristiwa konkrit tentang berjualan makanan yang kadaluarsa dijadikan peristiwa hukum. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada Putusan Nomor: 74/ Pid.Sus/ 2013/PN.WNS melanggar Pasal 56 huruf d jo Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan yang menentukan bahwa “barang siapa karena kelalaiannya: huruf d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan Pasal 21 huruf e menentukan bahwa “setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang sudah kadaluarsa”.

Proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan metode peranalogian yang dalam system penalaran yang dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu: Dalam hal ini hakim pada Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2013/PN.WNS melakukan penemuan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan.

### **3.2 Keputusan Hakim Dalam Memerikan Perkara Tentang Peredaran Produk Makanan Cacat Dalam Putusan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS**

Putusan Hakim yang bersifat menghukum tersebut melihat beberapa hal diantaranya; (a) unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum. Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SUWARNO bin PARTO REJO yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan; (b) Unsur Karena Kelalaiannya mengedarkan pangan yang sudah kadaluarsa Menimbang, bahwa yang dimaksud “kealpaannya“ dalam unsur pasal ini diartikan sebagai perbuatan kurang hati-hati, lalai lupa ataupun amat kurang perhatian. Hal ini bisa terlihat baik dari sikap lahir yang Nampak maupun sikap batin dari pelaku. Menimbang, bahwa dimaksud pangan menurut pasal 1 angka 1 UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman; (c) Menghukum kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Terdakwa melanggar Pasal 56 huruf d jo Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan yang

menentukan bahwa “barang siapa karena kelalaiannya: huruf d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan Pasal 21 huruf e menentukan bahwa “setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang sudah kadaluwarsa”.

Putusan hakim yang bersifat menghukum (*conemnatoir*) tersebut didasarkan pada isinya yang menyatakan bahwa; a) Terdakwa SUWARNO bin PARTO REJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Karena Kelalaiannya Mengedarkan Pangan Kadaluarsa”; b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; c) Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ; d) Menjatuhkan pula pidana kepada terdakwa tersebut berupa denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan; e) Menetapkan agar barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) bungkus piattos snack rasa sapi panggang @12 gram, 1 (satu) bungkus mickey snack (stik) ED 300612, 2 (dua) bungkus mickey snack (isi abon) ED 300612 dirampas untuk dimusnahkan; f) Membebaskan biaya.

Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa di antara mereka secara damai, dan kemudian menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersengketa akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan ini

mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Pada kasus Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS hakim memutuskan pada terdakwa berdasarkan peristiwa konkrit tentang berjualan makanan yang kadaluarsa dijadikan peristiwa hukum. Terdakwa melanggar Pasal 56 huruf d jo Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan yang menentukan bahwa “barang siapa karena kelalaiannya: huruf d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan Pasal 21 huruf e menentukan bahwa “setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang sudah kadaluarsa”.

Terdakwa melanggar Pasal 56 huruf d jo Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan yang menentukan bahwa “barang siapa karena kelalaiannya: huruf d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan Pasal 21 huruf e menentukan bahwa “setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang sudah kadaluarsa”.

*“Siapa saja menipu, maka ia tidak termasuk golonganku”.* (HR. Bukhari). DR Yusuf Qorodlowi dalam *Al-Halal wal Haram fil Islam* mengatakan, Setiap akad jual-beli yang mana membuka ruang sengketa dengan sebab ketidakjelasan barang, maka masuk dalam ghoror yang membawa pada pertikaian antara dua pihak atau penipuan satu sama lain. Rasulullah ﷺ melarang transaksi seperti ini dengan alasan preventif atas hal-hal yang tidak diinginkan.

Para ulama umumnya memberikan definisi tentang cacat adalah sebagai berikut: “Sesuatu yang kurang dari watak asal barang produksi, atau sesuatu yang



kurang dari pekerti syara' sehingga berpengaruh terhadap harga barang.”<sup>5</sup> Islam secara tegas melarang pelaku usaha menyembunyikan kecacatan atas produk yang ia perjualbelikan. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Uqbah bin ‘Amir al-Juhri yang berbunyi:<sup>6</sup> “apabila dalam barang yang akan diperjualbelikan terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka penjual diwajibkan untuk menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat suatu barang dengan sengaja merupakan salah satu bentuk penipuan dan kecurangan”.

Dari ‘Uqbah Ibn ‘Amir berjata “aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda” seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dan tidak halal (boleh) bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, ementara di dalamnya terdapat cacat (kekurangan), kecuali ia menjelaskannya kepadanya (HR. Ibn Majah).<sup>7</sup>

Dari Wasilah bn Al-Aqsa “aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: barangsiapa yang menjual (sesuatu) yang (didalamnya terdapat) cacat atau ‘aib (seadngkan) dia tidak menjelaskannya (maka), senantiasa dia berada dalam kemarahan (murka) Allah, dan senantiasa pra malaikat melaknatnya (HR. Ibn Majah).<sup>8</sup>

Berdasarkan kedua hadist tersebut, maka kesimpulannya adalah bahwa produsen dilarang menjual produknya yang mengndung aib, jika tidak menginformasikannya kepada konsumen. Tidak ada larangan bagi produsen menjual produk yang mengandung aib, sepanjang dia menginformasikannya kepada konsumen.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Mustafid*, Surabaya: Al-Hidayah, tt., 2/127

<sup>6</sup>AbūBakr Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqi as-Sunan as-Sagīr, *Bāb MāJā’a fīal-Tadlīs wa Kitmān al-‘Aib bi al-Mubī* (Beirut: Dār Al-Fikr; t,t), I: 483.

<sup>7</sup> Hadist 2246 Dalam Ibn Majah, 1996, *Sunan Ibn Majahm* Juz. III, Bairut: Dar al-Ma’Rifah, hal. 58.

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 59.

<sup>9</sup> Dr. Zulhm, 2018, *Peran Negra Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana, hal. 246-247.

### **3.3 Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Menentukan Peredaran Produk Makanan Cacat Dalam Putusan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS**

(a) Unsur Barangsiapa, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum. Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa SUWARNO bin PARTO REJO yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 huruf d jo Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan.

### **3.4 Keputusan Hakim Dalam Memerikan Perkara Tentang Peredaran Produk Makanan Cacat Dalam Putusan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS,**

Hakim memutuskan:Menyatakan bahwa terdakwa SUWARNO bin PARTO REJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Karena Kelalaiannya Mengedarkan Pangan Kadaluarsa”, hal ini sesuai dengan pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, hal ini sesuai dengan Pasal 56 huruf d jo Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan.

## **4. PENUTUP**

Diharapkan kedepannya para pedagang dalam jual beli menjual kualitas barang yang baik, sehingga konsumen tidak dirugikan baik dari sisi kualitas maupun kesehatan.

Diharapkan kedepannya pihak BPOM melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap setiap pedagang makanan, sehingga memberikan kenyamanan pada konsumen dan memberikan sanksi kepada pedagang yang menjual kualitas produk yang buruk.

Diharapkan kedepannya jenis delik yang diterapkan pada undang-undang mengenai pangan bukan delik aduan, akan tetapi jika seketika pedagang melakukan pelanggaran hukum maka akan diberikan sanksi secara tertulis, administrasi dan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V ,Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- al-Qurthuby, Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Mustafid*, Surabaya: Al-Hidayah, tt., 2/127
- as-Sagīr, AbūBakr Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqi as-Sunan, Bāb MāJā'a fīal-Tadlīs wa Kitmān al-‘Aib bi al-Mubī (Beirut: Dār Al-Fikr; t,t), I: 483.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grafindo Persada
- Bisri, Cik Hasan, 1996, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- B., Bustami, dan Nurlala, 2006, *Akuntansi biaya teori & aplikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- C., Saparinto, Dan Hidayati, 2010, *Bahan Tambahan Pangan*, Yogyakarta: Kanisius
- Dahlan, Abdul Azizi at. Al., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. I, Jilid IV
- Dr. Zulhm, 2018, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana
- Hansen dan Mowen, 2005, *Manajemen biaya*, Jakarta: salemba empat

Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, jakarta, Sinar Grafika

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003, *Laporan Akhir Rekrutmen Dan Karir  
Di Bidang Peradilan, Disusun Oleh Kelompok Kerja A.2 Fakultas Hukum  
Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*,  
Jakarta: Sinar Grafika